

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjawab permasalahan dan hambatan dengan hasil akhir mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (RPJM 2010-2014). Pembangunan yang sedang diusahakan membutuhkan bantuan dari sektor penanaman modal, kegiatan ini mampu menciptakan investasi yang dapat menambah stok modal (*capital stock*). Meningkatnya stok modal yang ada juga mampu meningkatkan produktivitas, jumlah, dan kualitas modal yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu menyerap tenaga kerja yang dimiliki.

Investasi yang tinggi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja mampu mengurangi pengangguran, kesejahteraan masyarakat meningkat. Investasi juga memungkinkan adanya pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan ke negara berkembang oleh negara maju.

Meningkatnya perekonomian bergantung pada pendapatan nasional yang mampu dihasilkan oleh negara, dikarenakan pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur penempatan sumberdaya yang efektif. Kapasitas pendapatan nasional yang mampu dihasilkan menggambarkan seberapa efisien sumberdaya yang ada (meliputi tenaga kerja dan modal). Sumberdaya tersebut juga dipergunakan sebagai alat ukur kekayaan suatu negara yang adalah pendapatan nasional per kapita, sedangkan alat ukur efisiensi adalah pendapatan per tenaga kerja.

Indonesia dalam hal ini menerapkan Kawasan Perdagangan Bebas khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat membentuk iklim investasi yang ideal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penanam modal asing dan membantu mengembangkan perekonomian. Dalam PP No 46, 47, 48 Tahun 2007 menetapkan 3 wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yaitu wilayah KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Dari ketiga KPBPB yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah diatas KPBPB Batam merupakan penyumbang investasi terbesar di provinsi kepulauan riau (Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Provinsi Kepulauan Riau 2014, 2015,2016,2017,2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1984, Batam pada awalnya hanya terdiri dari 3 kecamatan Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur, melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 diperluaslah kecamatan di Pulau Batam menjadi 12 kecamatan yaitu, Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Bulang, Galang, Batam Kota, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batuaji.

Batam pada awalnya berstatus kota administrative, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53/1999 dan diubah melalui Undang-Undang No 13/2000 status Daerah Otonom Kota Batam. Dengan terjadinya perkembangan berpengaruh terhadap perkembangannya terutama mengenai tata kelola pemerintahan menyangkut dua lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sejak berlakunya UU

Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 1999. Otorita Batam pun saat itu pun harus menyerahkan sebagian kewenangan mereka kepada Pemerintah Kota Batam.

Kemudian lewat PP Nomor 46 Tahun 2007 Otorita Batam diubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berada di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam yang diketuai Darmin Nasution Menteri Perekonomian. Pengelolaan Batam, merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, memiliki otoritas penuh berada di Badan Pengusahaan Batam.

Pengelolaan yang tidak satu atap atau adanya pengelolaan oleh berbagai pihak tersebut, menyebabkan pengembangan kawasan Batam menjadi tidak berfokus pada tujuan awal pembentukan kawasan, yaitu pemasukan devisa hasil ekspor yang signifikan, berkembangnya industri sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan penanaman modal asing maupun domestik dengan perusahaan baru yang terus tumbuh, dan meningkatkan arus wisatawan akibat berkembangnya ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Hal ini tercermin melalui surplusnya neraca perdagangan yang relatif stagnan, jumlah penduduk yang terus tumbuh sementara angkatan kerja yang terus menurun, pertumbuhan sektor perdagangan dan bangunan yang lebih tinggi dari pada sektor industri, dan industri pariwisata yang berbasis pada barang konsumtif. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas, karena perekonomian Batam dibentuk oleh insentif fiskal Pemerintah memberikan intensitif tersebut berupa pembebasan pajak, bea dan cukai. Sehingga seharusnya diharapkan terdapat hubungan langsung antara investasi Pemerintah berupa belanja negara dari APBN/APBD dan oportunitas

hilangnya pendapatan negara, terhadap kinerja struktur ekonomi kawasan yang berkembang ke arah penguatan sektor industri berbasis ekspor.

Permasalahan kelembagaan tersebut membentuk keterbatasan pengembangan ekonomi Batam, dimana BP Batam yang seharusnya memiliki peran sebagai organisasi berbasis bisnis dengan tujuan pengembangan ekonomi Batam hanya menjadi Lembaga konvensional yang hanya bersifat administrative dan pelayanan public.

BP Batam sendiri merupakan badan yang bekerja langsung dibawah Kementerian Perdagangan untuk mengatur pelayanan perizinan penanaman modal asing di Batam. Hal ini dimaksud untuk dapat memajukan penanaman modal khususnya asing

Dalam mengembangkan Investasi BP Batam yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan ekonomi di Pulau Batam untuk menarik peminat dalam menanamkan modal dengan adanya pasar bebas/global seharusnya dapat menjalankan perannya sebagai aktor negara dikarenakan target pemerintah adalah para investor penanam modal asing, lantas langkah yang perlu diambil selain melakukan promosi adalah dengan melakukan diplomasi dimana dalam hal ini diplomasi yang ditujukan bukan hanya sekedar antarpemerintah negara melainkan *Stakeholder* non pemerintah seperti pihak swasta, dan para investor.

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing di Kepulauan Riau

No	Tahun	Jumlah	
		Proyek	Investasi (juta US\$)
1	2014	128	392.100.000
2	2015	594	640.400.000
3	2016	880	519.100.000
4	2017	812	103.100.000
5	2018	804	813.248.000
6	2019	968	750,768.000
7	2020	2143	1.649.365.200
8	2021	667	347.773.100

Sumber: Publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.(telah diolah kembali)

Berdasarkan data Publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana pada tahun 2014 menuju 2015 Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dengan sangat besar jumlah proyek dari 128 proyek menjadi 594 proyek dan jumlah ini berbanding lurus dengan jumlah investasi dimana investasi pada tahun 2014 sebesar 392.100.000 USD mengalami kenaikan hingga mencapai 640.400.000 USD hal ini menjadi angin segar dalam perkembangan investasi di Kepulauan Riau sendiri. Memasuki tahun 2015 mengalami kenaikan terbesar dimana berada di angka 880 proyek namun tidak berbanding lurus bahkan berbanding terbalik jumlah investasi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hanya berada di angka 519.100.000 USD hal ini masih menjadi akar dan awal dari polemik yang seharusnya ketika banyaknya proyek diharapkan berbanding lurus dengan jumlah investasi yang di dapat. Beralih ke tahun selanjutnya 2017 jumlah



proyek mengalami penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 812 dan begitu pula dengan jumlah investasi mengalami penurunan yang mencapai 103.100.000 USD hal ini juga sangat signifikan penurunannya dimana penurunan yang terjadi merupakan penurunan yang sangat tinggi, hal ini mulai menimbulkan banyaknya perusahaan perusahaan yang pindah dan bahkan tutup dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh Pulau Batam khususnya, kemudian di tahun 2018 jumlah proyek juga mengalami penurunan namun masih berada di angka 804 proyek, kabar gembira datang dari jumlah investasi yang mengalami inflasi mencapai 813.248.000 USD hal ini merupakan kabar yang menggembirakan dan menjadi angin yang segar bagi sektor investasi dimana sudah mulai adanya kebangkitan ekonomi khususnya sektor investasi di Kepulauan Riau, dan di tahun 2019 sendiri masih memasuki triwulan pertama dimana proyek dan jumlah investasi kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dimana jumlah proyek berada hanya di angka 399 proyek dan jumlah investasi hanya berada di angka 454.867.000 USD hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab dari menurunnya kondisi dan ketidakstabilan iklim investasi di Kepulauan Riau, atau apa penyebab dari berkurangnya minat para investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Pulau Batam?

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan Mengapa Pulau Batam masih belum bisa berkembang dan menjadi mangsa pasar penanaman modal asing dan mengacu pada perkembangan investasi di pulau Batam yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menurun (Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2014-2019)

Permasalahan yang muncul mendorong penelitian ini untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut *Bagaimana Peran BP Batam selaku Lembaga non-struktural dalam mengembangkan Investasi/penanaman modal asing di Pulau Batam melalui kegiatan promosi sebagai bentuk diplomasi publik?*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Penanaman Modal Asing di Kota Batam mengalami penurunan dalam penanaman modal asing yang mana seharusnya sejak awal mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Johor dan Malaysia tidak mampu bersaing lalu peneliti menemukan rumusan masalah yaitu *Bagaimana peran BP Batam dalam mengembangkan Investasi/ penanaman modal asing melalui kegiatan promosi sebagai bentuk diplomasi publik?*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh BP Batam secara analisis dalam pengembangan Investasi khususnya investasi asing di pulau Batam serta sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis,
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.
  - c. memberikan kontribusi referensi terhadap pengembangan konsep Investasi Kawasan dan menjadi informasi dan edukasi serta referensi bacaan mengenai investasi bagi pembaca dari segala kalangan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BP Batam dalam mengambil langkah pengembangan investasi di Pulau Batam.

